

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA



Jl. Penjaringan Asri No. 36
Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut
60297 Surabaya

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Maksud dan Tujuan.....	2
I.1.1 Maksud Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah.....	2
I.1.2 Tujuan Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah.....	2
I.2 Landasan Hukum.....	2
I.3 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI RENJASAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN..	5
II.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I.....	5
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
II.2.1 Analisis IKK.....	21
II.2.2 Hal-hal Positif yang Sudah Berhasil Ditingkatkan Oleh Perangkat Daerah	22
II.2.3 Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	23
II.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.....	25
II.3.1 Isu Berkenaan Tugas dan Fungsi.....	25
II.3.2 Masalah dan Hambatan yang Dihadapi Terkait Pelayanan Oleh Perangkat Daerah.....	27
II.3.3 Peluang dan Tantangan.....	29
II.3.4 Rekomendasi Strategis Untuk ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan.....	29
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	31
III.1 Program dan Kegiatan	31
III.1.1 Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Dalam Penetapan Program dan Kegiatan	31
III.1.2 Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan.....	31
BAB IV PENUTUP.....	44

BAB. I

PENDAHULUAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan dokumen teknis operasional yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan selama Tahun 2025. Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kerja agar lebih terarah sesuai dengan Renstra 2021-2026 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu

Yang dimaksud dengan pendekatan kinerja adalah bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Yang dimaksud dengan kerangka pengeluaran jangka menengah adalah, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Perencanaan dan penganggaran terpadu adalah, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif

Pagu indikatif merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I.1 Maksud dan Tujuan

I.1.1 Maksud Penyusunan Renja Perubahan PD

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam periode waktu satu tahun.

I.1.2 Tujuan Penyusunan Renja Perubahan PD

Tujuan penyusunan Renja Perubahan PD adalah:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berdasarkan Renstra;
2. Menjadikan Renja Perubahan sebagai dokumen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
4. Menyediakan informasi tentang indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun 2025;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran PD.

I.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025;
15. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/134/436.1.2/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

I.3. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Maksud dan Tujuan

I.1.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

I.1.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

I.2 Landasan Hukum

I.3 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB. II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAN

Evaluasi pelaksanaan Renja dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja, melalui analisis terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Pencapaian tersebut akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, serta akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran.

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I

Tabel T-C. 29

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																						
2.07			Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																					
2.07.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			14,606,977		15,655,016		17,337,460		3,468,707		-		-		-		3,468,707		3,468,707		23,75 %
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan [429]	95 %		95.60 %		94%		98.47 %		-		-		-		98.47 %		98.47 %		103.65%	
2.07.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12,701,619				15,532,831		3,171,311		-		-		-		3,171,311		3,171,311		24.97 %
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [531]	100 %		100 %		100%		100 %		-		-		-		100%		100%		100.00%	
2.07.01.2.02.001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [1020]			12,701,619				15.532.831		3.171.311		-		-		-		3.171.311		3.171.311		24,97 %

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [4888]		31 Orang/bulan		50 Orang/bulan		52 Orang/bulan		49 Orang/bulan		-		-		-		49 Orang/bulan		49 Orang/bulan		158.06%	
2.07.01.2.08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,905,358				1,804,630		297,396		-		-		-		297,396		297,396		15.61%
							Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [513]		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%	
							Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [2130]		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%	
2.07.01.2.08.004						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [3519]				1,596,618				1,603,417		280.423		-		-		-		280.423		280.423		17,56%
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [4895]		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%	
2.07.01.2.08.003						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [1018]				308,739				201.213		16.973		-		-		-		16.973		16.973		5,50%
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [4887]		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%	

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
2.07.03				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		11,303,582		7,930,603		9,137,009		541,055		-		-		-		541,055		541,055		4,79%
				Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten [746]	85.02 %		94.02 %		83.02 %		70.54 %		-		-		-		70.54 %		70.54 %		82.97 %	
				Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan [206]	91.70 %		99.60 %		90.70 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		109.05 %	
2.07.03.2.01				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		6,876,862				6,357,686		365,652		-		-		-		365,652		365,652		5,32%
				Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan [676]	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		-		-		-		0 Laporan		0 Laporan		0.00%	
				Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi [259]	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		-		-		-		1 Laporan		1 Laporan		25.00 %	
2.07.03.2.01.002				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana		434,813				520.963		58.55		-		-		-		58.55		58.55		13,47 %

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
						Lembaga Pelatihan Kerja [719]																				
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n [4881]	12 Lembaga		14 Lembaga		12 Lembaga		1 Lembaga		-		-		-		1 Lembaga		1 Lembaga		8.33%	
2.07.03.2.01.001						Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi [705]		6,442,049				5.836.722		307.102		-		-		-		307.102		307.102		4,77%
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n [4880]	720 Orang		752 Orang		720 Orang		112 Orang		-		-		-		112 Orang		112 Orang		15.56%	
2.07.03.2.04						Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		305,648				287,689		8,200		-		-		-		8,200		8,200		2.68%

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
						Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun [935]	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%	
2.07.03.2.04.001						Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil [1700]		305,648				287.689		8.2		-		-		-		8.2		8.2		2,68%
						Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas [4891]	50 Perusahaan		53 Perusahaan		50 Perusahaan		10 Perusahaan		-		-		-		10 Perusahaan		10 Perusahaan		20.00%	
2.07.03.2.05						Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4,121,071				2,491,634		167,203		-		-		-		167,203		167,203		4,06%
						Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi [276]	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		-		-		-		1 Laporan		1 Laporan		25.00%	
2.07.03.2.05.001						Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja [720]		4,121,071				2,491,634		167,203		-		-		-		167,203		167,203		4,06%
						Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah [4882]	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		1 Dokumen		-		-		-		1 Dokumen		1 Dokumen		25.00%	
2.07.04						Program Penempatan Tenaga Kerja		3,690,000		1,626,716		2,553,785		290,086		-		-		-		290,086		290,086		7,86%

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
					Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan [160]	5%		3.00%		4%		0.00%		-		-		-		0.00%		0.00%		0.00%	
2.07.04.2.01					Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		2,280,264				1,749,005		221,975		-		-		-		221,975		221,975		9.73%
					Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis [203]	9 laporan		9 laporan		9 laporan		2 laporan		-		-		-		2 laporan		2 laporan		22.22%	
2.07.04.2.01.002					Pelayanan antar Kerja [779]		24,068				136.669		5.6		-		-		-		5.6		5.6		23,27%
					Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL [4885]	2150 Orang		2002 Orang		2050 Orang		204 Orang		-		-		-		204 Orang		204 Orang		9.49%	
2.07.04.2.01.003					Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja [594]		1,151,313				584.653		122.554		-		-		-		122.554		122.554		10,64%
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan [4879]	1500 Orang		1100 Orang		1200 Orang		205 Orang		-		-		-		205 Orang		205 Orang		13.67%	
2.07.04.2.01.005					Perluasan Kesempatan Kerja [914]		1,104,883				1.027.683		93.821		-		-		-		93.821		93.821		8,49%

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja [4886]	250 Ora ng		274 Ora ng		250 Orang		65 Ora ng		-		-		-		65 Orang		65 Orang		26.00 %	
2.07.04.2.03						Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			338,718				363,652		5,600		-		-		-		5,600		5,600		1.65%
							Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja [423]	7 Lap ora n		5 Lap ora n		5 Lapor an		1 Lap ora n		-		-		-		1 Lapor an		1 Lapor an		14.29 %	
2.07.04.2.03.003						Job Fair /Bursa Kerja [1120]			338,718				363.652		5.6		-		-		-		5.6		5.6		1,65%
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja [4889]	350 Ora ng		324 Ora ng		250 Orang		50 Ora ng		-		-		-		50 Orang		50 Orang		14.29 %	
2.07.04.2.04						Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			1,071,018				441,128		62,511		-		-		-		62,511		62,511		5.84%
							Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI [268]	7 Lap ora n		5 Lap ora n		6 Lapor an		1 Lap ora n		-		-		-		1 Lapor an		1 Lapor an		14.29 %	

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
															K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
2.07.04.2.04.001						Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) [728]				1,071,018				441.128		62.511		-		-		-		62.511		62.511		5,84%
							Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya [4883]		350 Orang		250 Orang		300 Orang		85 Orang		-		-		-		85 Orang		85 Orang		24.29 %	
2.07.05						Program Hubungan Industrial				2,216,940		1,336,638		2,081,048		257,828		-		-		-		257,828		257,828		11,63 %
						Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama [354]		15.04 %			14.37 %		14.41 %		14.57 %		-		-		-		14.57 %		14.57 %		96.88 %	
						Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan [748]		60 %			41.27 %		50%		43.16 %		-		-		-		43.16 %		43.16 %		71.93 %	

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
2.07.05.2.01					Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1,358,206			1,311,953		199,838		-		-		-		199,838		199,838		14.71 %		
						Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan [888]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	-		-	-	-	3 Laporan		3 Laporan		25.00 %					
2.07.05.2.01.001					Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan [1576]			62,206			56.869		5.6		-		-		5.6		5.6		9,00%				
						Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online [4890]	220 Perusahaan		294 Perusahaan		220 Perusahaan	74 Perusahaan	-		-	-	-	74 Perusahaan		74 Perusahaan		33.64 %					

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)				
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
2.07.05.2.01.003						Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan [539]			1,296,000				1.255.084			194.238			-			-					194.238				14,99 %
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan [4877]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan			25.00 %		
2.07.05.2.02						Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			858,734				769,095			57,990			-			-				57,990				6.75%	
							Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota [905]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan			25.00 %		

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
2.07.05.2.02.001						Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota [542]				525,521				435.65		31.626		-		-		-		31.626		31.626		6,02%
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah [4878]		50 Per kar a		64 Per kar a		50 Per kar a		15 Per kar a		-		-		-		15 Per kar a		15 Per kar a		30.00 %	
2.07.05.2.02.002						Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota [729]				333,213				333.445		26.365		-		-		-		26.365		26.365		7,91%
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan [4884]		110 Per kar a		120 Per kar a		110 Per kar a		22 Per kar a		-		-		-		22 Per kar a		22 Per kar a		20.00 %	
3		Urusan Pemerintahan Pilihan																										
3.31			Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																									
3.31.02						Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri				726,718		495,562		958,755		36,033		-		-		-		36,033		36,033		4,96%

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
					Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan [1512]	26 %		20.01 %		22%		3.79%		-		-		-		3.79%		3.79%		14.58 %		
3.31.02.2.01					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		726,718			958,755		36,033		-		-		-		36,033		36,033		4.96%		
						Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha [1864]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00 %	
3.31.02.2.01.004					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri [4701]		136,965			136.965		0		-		-		-		0		0		0,00%		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri [6885]	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%	
3.31.02.2.01.005					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat [3431]		589,753			821.79		36.033		-		-		-		36.033		36.033		6,11%		

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
							12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		3 Dokumen		-		-		-		3 Dokumen		3 Dokumen		25.00 %	
3.31.03					Program Pengendalian Izin Usaha Industri			331,422		295,539		375,278		29,050		-		-		-		29,050		29,050		8,77%
					Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya [1416]		90 %		85.21 %		87%		38.13 %		-		-		-		38.13 %		38.13 %		42.37 %	
3.31.03.2.01					Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			331,422				375,278		29,050		-		-		-		29,050		29,050		8.77%
					Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha [1716]		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00 %	
3.31.03.2.01.003					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota [3281]			331,422				375,278		29.05		-		-		-		29.05		29.05		8,77%

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
							12 Do ku me n		12 Do ku me n		12 Doku men		3 Do ku me n		-		-		-		3 Doku men		3 Doku men		25.00 %	
3.31.04					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			213,589		227,600		342,244		39,600		-		-		-		39,600		39,600		18,54 %
					Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri [1513]		100 %		100 .00 %		100%		100 .00 %		-		-		-		100.0 0%		100.0 0%		100.0 0%	
3.31.04.2.01					Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			213,589				342,244		39,600		-		-		-		39,600		39,600		18,54 %

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
							1 Lap ora n		1 Lap ora n		1 Lapor an		0 Lap ora n		-		-		-		0 Lapor an		0 Lapor an		0.00%	
3.31.04.2.01.001						Fasilitasi Pengumpulan , Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/K ota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) [3432]		213,589				342.244		39.6		-		-		-		39.6		39.6		18,54 %
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) [4894]	12 Do ku me n		12 Do ku me n		12 Doku men		3 Do ku me n		-		-		-		3 Doku men		3 Doku men		25.00 %	

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan. Pencapaian tersebut akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, serta akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

II.2.1 Analisa IKK

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya mempunyai 2 (dua) Fokus Indikator Kinerja Kunci yaitu :

1. Meningkatkan Pemenuhan Kesempatan Kerja Bagi Angkatan Kerja. Dengan indikator Persentase Tenaga Kerja yang Terserap;
2. Menciptakan Hubungan Antar Pemangku Kepentingan Dalam Lingkup Industrial Yang Harmonis melalui Pengembangan Sarana Hubungan Industrial, Mediasi dan Perlindungan Ketenagakerjaan, dengan indikator Persentase Jumlah Kasus Ketenagakerjaan.

II.2.2 Hal-Hal Positif Yang Sudah Berhasil Ditingkatkan Oleh Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Tupoksi Perangkat Daerah yang pada berikutnya dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang mengacu pada Renja Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kota Surabaya 2016-2021. Sesuai dengan Renstra Tahun 2016-2021 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 mempunyai program utama dan 3 (tiga) serta program pendukung sebanyak 3 (tiga) program, yang merupakan turunan dari Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Realisasi Capaian Program Renstra sebagai berikut :

No	Program Dan Indikator		Formulasi	2022		2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
				(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Program Penempatan Tenaga Kerja								
		Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	(Jumlah kesempatan kerja tahun berjalan - Jumlah kesempatan kerja tahun sebelumnya / Jumlah kesempatan kerja tahun sebelumnya) x 100	2%	2.02%	2.50%	3.50%	3%	3%
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja								
		Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	(Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan pada tahun t / jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi pada tahun t) X 100%	90.05%	98.36%	90.20%	97.96%	90.05%	98.6%
		Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	(Jumlah Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus uji kompetensi pada tahun t / jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi pada tahun t) X 100 %	77.02%	83.06%	79.02%	80.84%	81.02%	94.02%

3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							
	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	(Jumlah Perusahaan memiliki PP/PKB : Jumlah Perusahaan(t0)) X 100%	12.51%	13%	13.14%	13.58%	13.77%	14.37%
	Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	(Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan Data Ketenagakerjaan : Jumlah Perusahaan x 100%)	20%	21.06%	30%	30.95%	40%	41.27%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Survey tingkat kepuasan pegawai melalui eperformance	91%	93.88%	92%	94.37%	93%	95.8%
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
	Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	(Jumlah pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan pada tahun t : jumlah pelaku usaha pada tahun t) X 100%	15%	16.39%	17%	17.05%	20%	20.01%
6	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							
	Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	Jumlah Sarpras Dalam Kondisi Baik dibagi Jumlah Sarpras dikali 100%	80%	99.77%	82%	100%	85%	85.21%
7	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							
	Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	(Jumlah dokumen yang menjadi dasar dalam proses perencanaan industri : Jumlah dokumen yang dihasilkan) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

II.2.3 Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	TUJUAN				
1	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan	Persentase tenaga kerja yang terserap	21.57%	22.67% (Jumlah pencari kerja yang bekerja 7760/jumlah pencari kerja yang terdata 34230 x100%)	105.10%

2	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha	77%	100.00% ((Jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun t (660) : Jumlah pelaku usaha pada tahun t (660)) X 100%	129.87%
	SASARAN				
1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	87.46	93.65 Penghitungan Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dilakukan oleh Inspektorat Kota Surabaya	107.08%
2	Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis	Persentase perusahaan yang memiliki Syarat Kerja Layak	13.51%	13.57% (Jumlah Perusahaan yang memiliki Syarat Kerja Layak 1437 : Jumlah Perusahaan (t0) 10592 X 100%)	100.44%
3	Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis	Persentase perusahaan dengan kondisi hubungan industrial yang harmonis	99%	99.94% (Jumlah Perusahaan yang tidak Memiliki Kasus Mogok Kerja 10586 : Jumlah Perusahaan 10592 X 100%)	100.95%
4	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja	32.71%	33.35% (Pencari Kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja sampai dengan tahun t 11416 / Pencari Kerja pada tahun dasar 34230) X 100%	101.96%
5	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja Yang Telah Meningkat Kompetensinya	28.05%	28.48% (Pencari kerja yang telah lulus sertifikasi sampai dengan tahun t 9747 / Pencari Kerja pada tahun dasar 34230) X 100%	101.53%
6	Meningkatkan pelaku usaha yang memiliki izin	Persentase peningkatan pelaku usaha yang mengurus perizinan	18.49%	28.80% (Jumlah pelaku usaha yang mengurus perizinan tahun t 436 / estimasi pelaku usaha yang mengurus perizinan selama 5 tahun 1514) x 100%	155.76%

7	Meningkatkan Tenaga Kerja yang Terserap pada Pasar Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap pada Pasar Kerja Formal	17.57%	21.17% (Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan 7246 / Jumlah Pencari Kerja yang terdata t0 34230)x 100%	120.49%
---	--	---	--------	---	---------

II.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan. Pencapaian tersebut akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, serta akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

II.3.1 Isu Berkenaan Tugas dan Fungsi

Isu isu penting berkenaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja :

1. Masalah pada sektor Industri, antara lain :
 - a. Rendahnya Produktivitas Industri;
 - b. Belum optimalnya penerapan sistem informasi dan perumusan kebijakan pengembangan industri;
 - c. Belum optimalnya penerapan standarisasi, desain produk, dan teknologi industri;
 - d. Kurangnya Pemahaman Manfaat dari Legalitas, Standarisasi, dan Sertifikasi Produk;
 - e. Belum Optimalnya Sosialisasi;
 - f. Belum Optimalnya Komitmen Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan terkait legalitas, standarisasi, dan sertifikasi produk;
 - g. Mahalnya Biaya Sertifikasi dan Standarissasi Produk.
2. Masalah Daya saing tenaga kerja (pengangguran), antara lain disebabkan :
 - a. Hadirnya pasar bebas dan MEA;
 - b. Peningkatan angka pengangguran;
 - c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
 - d. Kemampuan kompetensi pekerja dan pencari kerja;
 - e. Peningkatan Produktifvitas Kerja;
 - f. Sertifikasi Profesi.

3. Masalah tingginya angka perselisihan hubungan industrial antara lain disebabkan :

- a. Besaran Upah Minimum Kab/Kota;
- b. Masih Tingginya Perselisihan Hubungan industrial,

Datangnya pasar bebas dan global serta mulainya MEA tentunya dapat berpengaruh pada perubahan, khususnya pada bidang ketenagakerjaan. Hal ini merupakan tantangan yang harus dipersiapkan dalam menghadapinya. Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka :

I. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek, telah melaksanakan tugas dan fungsinya, hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugasnya diantaranya :

1. Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial meliputi Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, dan Perselisihan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Memberikan pencatatan terhadap Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan LKS Bipartit;
3. Pencatatan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu);
4. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
5. Pelaksanaan survei harga pasar dalam rangka penetapan usulan UMK;
6. Pembinaan dalam hubungan kerja (Norma-norma ketenagakerjaan, Bimtek Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak, serta Penghormatan Penyandang Disabilitas, Bimtek Pencegahan dan Penanggulangan HIV, AIDS, dan TBC, serta Bimtek Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba di Tempat Kerja);
7. Meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh melalui Program Jamsostek.

II. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Data pengangguran di Kota Surabaya pada Tahun 2024, sebanyak 79.767 Orang (Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik yaitu Berita Resmi Statistik tentang "Keadaan Ketenagakerjaan Kota Surabaya Agustus 2024"), oleh sebab itu diperlukan langkah kebijakan dalam merumuskan penanganan penempatan kerja yang terlatih dan berkompeten baik melalui sektor formal ditempuh dengan meningkatkan pelayanan pendataan rekrutmen kepada

pengguna kerja serta memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja melalui :

1. Bursa Kerja;
2. Pencarian Lowongan;
3. Menempatkan Tenaga Kerja;
4. Memberikan Penyuluhan dan Sosialisasi Prosedur Penempatan Kerja;
5. Kegiatan Pelatihan Kerja;
6. Peningkatan Kompetensi;
7. Fasilitasi Magang Kerja;
8. Sertifikasi Kompetensi;
9. Identifikasi Pengukuran Tingkat Produktivitas Skala Kota;
10. Fasilitasi Identifikasi Tingkat Produktivitas Perusahaan.

III. Bidang Industri

Melaksanakan tugas di bidang industri yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

IV. Sekretariat

Sekretariat sesuai dengan tugasnya melaksanakan tugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan yaitu :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran;
3. Pelayanan Kedinasan./ Pelayanan Administrasi Perkantoran;
4. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan;
5. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis.

II.3.2 Masalah Dan Hambatan Yang Dihadapi Terkait Pelayanan Oleh Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya tentunya terdapat permasalahan dalam pelaksanaan bersumber dari internal dan tantangan bersumber dari eksternal (masyarakat, pengguna layanan, dsb). Tantangan dan permasalahan dapat diidentifikasi sesuai tupoksi Bidang teknis yang melaksanakan yaitu :

ASPEK	PERMASALAHAN	HAMBATAN
1	2	3
1. Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja atau angkatan kerja.	1. Jumlah pegawai fungsional tertentu dan umum bidang ketenagakerjaan
	2. Belum maksimalnya sosialisasi & pemasaran program pelatihan kepada masyarakat, dunia usaha/industri, dunia pendidikan	2. Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan berupa transportasi, komputer dan ruang pelayanan
	3. Tingkat pemahaman masyarakat pekerja dan pengusaha terhadap aturan ketenagakerjaan	3. Sistem Pengelolaan database ketenagakerjaan yang terintegrasi
	4. Sistem, mekanisme & sarpras informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal & efektif.	4. Perkembangan teknologi
	5. Kurangnya Pegawai fungsional Pengantar Kerja untuk mendukung optimalisasi penempatan tenaga kerja	
2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas	1. Belum maksimalnya sosialisasi & pemasaran program pelatihan kepada masyarakat, dunia usaha/industri, dunia pendidikan	1. Jumlah pegawai fungsional tertentu dan umum bidang ketenagakerjaan
	2. Tingkat pemahaman masyarakat pekerja dan pengusaha terhadap aturan ketenagakerjaan	2. Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan berupa transportasi, komputer dan ruang pelayanan
	3. Masih terbatasnya Tempat Uji Kompetensi beserta sumber daya pendukungnya.	3. Sistem Pengelolaan database ketenagakerjaan yang terintegrasi
		4. Perkembangan teknologi.
3. Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1. Tingkat pemahaman masyarakat pekerja dan pengusaha terhadap aturan ketenagakerjaan	1. Jumlah pegawai fungsional tertentu dan umum bidang ketenagakerjaan
	2. Masih kurangnya pegawai fungsional Pengawas ketenagakerjaan dan pegawai fungsional mediator PHI	2. Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan berupa transportasi, komputer dan ruang pelayanan
	3. Tingkat pemahaman masyarakat pekerja dan pengusaha terhadap aturan ketenagakerjaan	3. Sistem Pengelolaan database ketenagakerjaan yang terintegrasi
	4. Belum optimalnya pembinaan kelembagaan hubungan industrial terhadap pengusaha maupun pekerja	4. Perkembangan teknologi
Perindustrian	1. Rendahnya produktivitas Industri	1. Belum optimalnya struktur industri (hulu- antara-hilir)
	2. Belum optimalnya Penerapan sistem informasi dan perumusan kebijakan pengembangan industri dan perdagangan	2. Belum optimalnya sistem informasi dan data industri
	3. Belum optimalnya penerapan standardisasi, desain produk, dan teknologi	3. Produk IKM belum memenuhi standarisasi

	industri	4. Sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum tersedia
--	----------	---

II.3.3 Peluang dan Tantangan

ASPEK	PELUANG	TANTANGAN
1	2	3
1. Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Kerjasama dengan dunia kerja dan dunia pendidikan terkait penempatan kerja 2. Dukungan partisipasi pelaku hubungan industrial 3. Kesempatan bekerja di luar negeri	1. Perbandingan pertumbuhan pencari kerja dengan pertumbuhan lowongan pekerjaan 2. Kualitas dan produktifitas kerja dalam menghadapi persaingan global
2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas	1. Kerjasama dengan dunia kerja dan dunia pendidikan terkait penempatan kerja 2. Dukungan partisipasi pelaku hubungan industrial 3. Kesempatan bekerja di luar negeri	1. Kualitas dan produktifitas kerja dalam menghadapi persaingan global
3. Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1. Dukungan partisipasi pelaku hubungan industrial	1. Perubahan regulasi teknis Pemerintah Pusat bidang pengawasan Ketenagakerjaan 2. Kualitas dan produktifitas kerja dalam menghadapi persaingan global
4. Perindustrian	1. Kurangnya pengetahuan tentang industri 4.0 2. Tingginya Biaya Investasi 3. Masalah resiko keamanan cyber 4. Kurangnya keterampilan dan kompetensi pekerja	1. Adanya koordinasi antar instansi dan lembaga 2. Tersedianya sumber daya 3. Tersedianya regulasi 4. Tersedianya sumber daya manusia

II.3.4 Rekomendasi Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun Yang Direncanakan

Sesuai dengan isu strategis, permasalahan dan tantangan pelayanan berdasar Tugas dan Fungsi pelayanan tahun perencanaan kedepan adalah :

No	PELAKSANA	PROGRAM	STRATEGI/KEGIATAN
1	Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
2	Bidang Pelatihan dan Produktivitas	Program Pelatihan Kerja Dan	Pelatihan Berbasis Kompetensi Pemagangan Kerja

	Kerja	Produktivitas Tenaga Kerja	Sertifikasi Profesi
3	Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja Dan Jamsostek	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
4	Bidang Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

BAB. III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari PD untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Renja PD ini mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan di Renstra PD serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025.

III.1.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Penetapan Program Dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 tersebut ditetapkan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan yaitu :

- 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah
- 2) Tugas dan Fungsi PD
- 3) Program Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah
- 4) Isu-isu Strategis

III.1.2 Garis Besar Rekapitulasi Program Dan Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan/Sub.Kegiatan
I	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
	Pelayanan antar Kerja
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
	Perluasan Kesempatan Kerja
II	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	Job Fair/Bursa Kerja
III	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
--	--

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan/Sub.Kegiatan
I	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
II	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
III	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

3. Program Hubungan Industrial, dengan kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan/Sub.Kegiatan
I	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
II	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada

		Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
--	--	---

4. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, dengan kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan/Sub.Kegiatan
I	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

5. Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan/Sub.Kegiatan
I	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

6. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan/Sub.Kegiatan
I	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui

	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
--	---

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan/Sub.Kegiatan
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
II	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

Tabel T-C.31
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%	17,337,460,194	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94%	17,520,559,333	
	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15,532,830,670	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15,790,479,430	
	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	15,532,830,670	2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	15,790,479,430	
	2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1,804,629,524	2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1,730,079,903	
			Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan				Jumlah Laporan Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan		
	2.07.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	201,212,700	2.07.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	138,232,000	
	2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,603,416,824	2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,591,847,903	

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	83,02 %	9,137,008,743	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	83,02 %	11,366,564,089	
			Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	90,7 %				Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	90,7 %		
	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	4 Laporan	6,357,685,747	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah laporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	4 Laporan	7,967,376,136	
			Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan	1 Laporan				Jumlah laporan pelaksanaan pemagangan	1 Laporan		
	2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	720 Orang	5,836,722,384	2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	720 Orang	7,553,259,896	
	2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12 Lembaga	520,963,363	2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	12 Lembaga	414,116,240	
	2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	1 Dokumen	287,688,800	2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	1 Dokumen	277,960,320	

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

No	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif
			2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	287,688,800			2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	277,960,320	
		2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	4 Laporan	2,491,634,196		2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah laporan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi	4 Laporan	3,121,227,633	
			2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen	2,491,634,196			2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	4 Dokumen	3,121,227,633	
3	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	4%	2,553,785,082	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	4%	2,442,732,658	
		2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis	9 laporan	1,749,005,136		2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis	9 laporan	1,789,927,207	
			2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2050 Orang	136,669,442			2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2050 Orang	141,945,248	
			2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1200 Orang	584,652,683			2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1200 Orang	570,615,973	
			2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	250 Orang	1,027,683,011			2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	250 Orang	1,077,365,986	

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	5 Laporan	363,652,260	2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah laporan penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	5 Laporan	295,082,260	
	2.07.04.2.03.0003 Job Fair /Bursa Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	250 Orang	363,652,260	2.07.04.2.03.0003 Job Fair /Bursa Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	250 Orang	295,082,260	
	2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	6 Laporan	441,127,686	2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	6 Laporan	357,723,191	
	2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	300 Orang	441,127,686	2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	300 Orang	357,723,191	
4	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	14,41 %	2,081,047,764	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	14,41 %	7,130,011,605	
			Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	50%				Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	50%		

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12 Laporan	1,311,953,210	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12 Laporan	1,198,625,371	
	2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	220 Perusahaan	56,869,090	2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	220 Perusahaan	55,950,000	
	2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	1,255,084,120	2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	1,142,675,371	
	2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah		Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	12 Laporan	769,094,554	2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di	12 Laporan	5,931,386,234	

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota			
	2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	435,649,627	2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	446,384,611	
	2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	110 Perkara	333,444,927	2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	110 Perkara	313,961,623	
	2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				0	2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	25650 Orang	5,171,040,000	
5	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	22%	958,755,231	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	22%	798,071,672	

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	12 Laporan	958,755,231	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	12 Laporan	798,071,672	
	3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	136,965,000	3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	136,965,000	
	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	821,790,231	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	661,106,672	
6	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	87%	375,277,657	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	87%	368,530,210	
	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha	12 Laporan	375,277,657	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha	12 Laporan	368,530,210	

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri Kecil dan industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 Dokumen	375,277,657	3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 Dokumen	368,530,210	
7	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	100%	342,244,200	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	100%	339,980,000	
	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha dan analisis sektor industri, yang berlokasi di Kota Surabaya	1 Laporan	342,244,200	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha dan analisis sektor industri, yang berlokasi di Kota Surabaya	1 Laporan	339,980,000	

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif
		3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	342,244,200		3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen	339,980,000	

BAB. IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rancangan perubahan RKPD tahun 2025. Dokumen Rancangan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja akan disempurnakan menjadi dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 26 Juni 2025
Kepala Dinas



Agus Hebi Djuniantoro, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196906121998031019